

LAGI RAME! Resolusi Tahun Baru 2024: Menjadi Versi Terbaik Dirimu



KAMU PASTI SUKA!



Konstruksi Ruang Publik, dan Opini Publik (14)



Emansipasi dan Ideologi Politik Perusahaan Publik



Konstruksi Ruang Publik dan Opini Publik



Danang Satria Nugraha

Dosen - Pengajar di Universitas Sanata Dharma

FOLLOW

Selain mengajarkan ilmu bahasa dan meneliti fenomenanya di ruang publik, penulis gemar mengamati pendidikan dan dinamikanya.

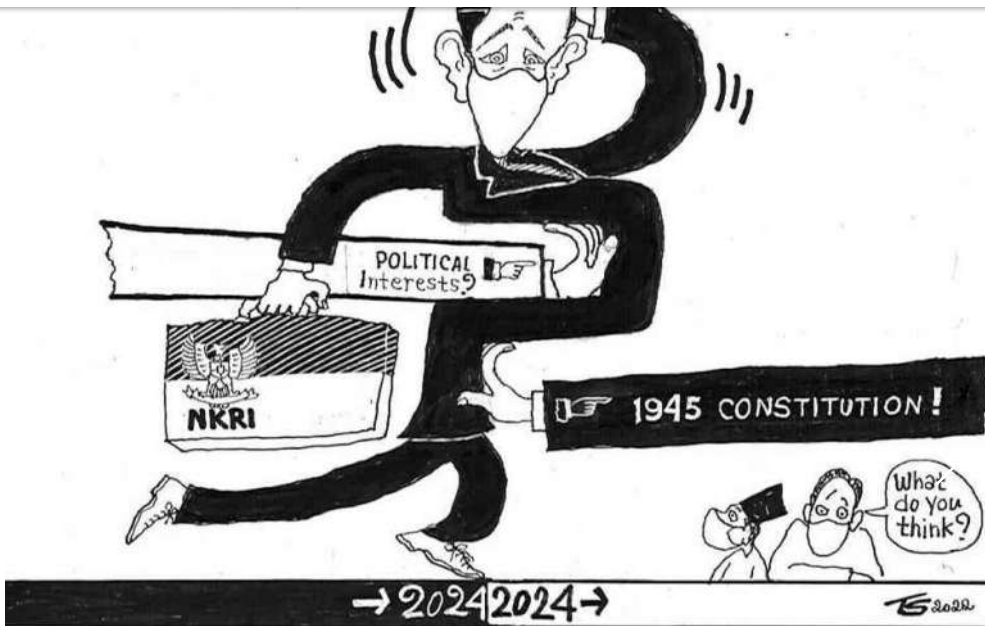
POLITIK PILIHAN

Bahasa Politik & Pembentukan Wacana Publik

2 Januari 2024 21:29 | Diperbarui: 2 Januari 2024 21:29 | 11 0 0



Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab blogger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompasiana.



Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana



Email Anda

Daftar

POPULER

REKOMENDASI



- 1 **Pentingnya Membangun Kesadaran Politik di Kalangan**
Irvan Ulvatur Rohman | Dibaca 660
- 2 **Peran Media Sosial dalam Politik Kontemporer**
Irvan Ulvatur Rohman | Dibaca 631
- 3 **Mencari Hikmah 2023 Melalui Resolusi 2024 Bagi Murid, Guru**
Eko Adri Wahyudiono | Dibaca 453
- 4 **Pasang Foto Profil Maaf Sedang Cuti, Berlebihan atau**
Widha Karina | Dibaca 441
- 5 **Jelang West Ham vs Brighton: Nasib Mohammed Kudus Masih**
Greg Satria | Dibaca 358

Selengkapnya

(JP/T. Sutanto via thejakartapost.com)



NILAI TERTINGGI



Berikan Bintang Anda X CLOSE

Advertisement

protect us from ourselves.”

— Ronald Reagan

Esai tentang "Bahasa **Politik** dan Pembentukan Wacana **Publik**" ini merupakan ulasan yang mempertimbangkan peran penting bahasa dalam membentuk opini **publik** dan **politik**.

Dalam esai ini, akan dipelajari bagaimana penggunaan kata-kata, narasi, dan retorika politik memengaruhi persepsi masyarakat serta membentuk kerangka pikir dalam ranah publik.

Esai ini juga akan menguraikan bagaimana bahasa politik tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi cenderung diposisikan sebagai instrumen kekuasaan yang dapat membentuk opini, mempengaruhi kebijakan, dan membentuk realitas sosial.

Pembentukan Pertama

Bagaimana penggunaan retorika politik oleh pemimpin atau pihak berkepentingan tertentu memengaruhi persepsi masyarakat dalam pembentukan opini dan sikap politik?

Penggunaan retorika politik oleh pemimpin atau pihak berkepentingan dapat secara signifikan memengaruhi persepsi masyarakat dalam membentuk opini dan sikap politik. Bahasa yang dipilih, gaya komunikasi, serta narasi yang digunakan oleh para pemimpin dapat mempengaruhi emosi, keyakinan, dan sikap masyarakat terhadap isu-isu politik tertentu.

Misalnya, penggunaan kata-kata yang memprovokasi atau membangkitkan emosi tertentu dapat memperkuat pandangan tertentu atau mempengaruhi opini publik terhadap suatu kebijakan atau figur politik.

Dengan demikian, retorika politik bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga merupakan strategi kuat untuk membentuk dan mengarahkan pendapat serta sikap masyarakat dalam politik.

Lebih lanjut, penggunaan retorika politik oleh para pemimpin atau pihak berkepentingan memainkan peran krusial dalam membentuk opini publik. Ketika para pemimpin menghadapi masyarakat, gaya komunikasi mereka, pemilihan kata-kata, serta narasi yang dibangun dapat secara langsung memengaruhi persepsi, keyakinan, dan sikap politik masyarakat.

Isu **Logiswandum**

Kata Bijak Warren Buffet: Jika Gaji Satu-satunya Sumber

Noer Ashari

Terbalik...

Herman Utomo

Macro Puisi: Pasrah dan Penerimaan

Bambang Syairudin

TERBARU

Profil Syaiful Anam

Solikhul Hadi

👁 0

Nasib Tukang Becak di Pangandaran: Terhimpit

Kartikasimorangkir 015

👁 0

Menata Hidup Baru di Tahun Baru 2024

Andi Samsu Rijal

👁 0

Langkah Peduli Mahasiswa KKN Undip Menyuarakan Ancaman

Alisya Cahya Namira

👁 2

TikTok Vs UMKM Indonesia

Masrur Maulidy

👁 1

ARTIKEL UTAMA

Rumah

Zahrotul Mujahidah ✓

👁 216

Diakonia, Pelayanan Kecil yang Berdampak Besar

Yulius Roma Patandean

👁 264

Bagaimana Supaya Tugas KPPS Cepat Selesai dan Aman?

Bude Ruri ✓

👁 157

Selamat Datang 2024! Ini Ceri

X CLOSE

Teknik-teknik retorika, seperti framing (pembentukan kerangka pikir) dan penggunaan metafora yang kuat, dapat mempengaruhi cara orang memahami isu-isu politik kompleks.

Selain itu, retorika politik juga dapat digunakan untuk meredakan ketegangan atau memperluas dukungan untuk kebijakan tertentu. Para pemimpin sering kali menggunakan teknik retorika seperti persuasi dan negosiasi dalam pidato atau pernyataan mereka untuk meraih dukungan yang lebih luas dari masyarakat.

Secara kokret, berikut adalah tiga contoh spesifik mengenai penggunaan retorika politik di Indonesia yang memengaruhi persepsi masyarakat. Pertama, Pemilihan Umum dan Penggunaan Bahasa Emosional; Pada pemilihan umum di Indonesia, sering terjadi penggunaan bahasa emosional oleh calon politikus untuk mempengaruhi pendapat publik. Contohnya, dalam pidato atau kampanye, penggunaan kata-kata yang membangkitkan semangat nasionalisme atau janji-janji yang menggugah emosi, sering digunakan untuk menarik perhatian dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Kedua, Kasus Kontroversial dan Pengaruh Media Sosial. Dalam konteks isu kontroversial, politisi atau tokoh publik di Indonesia sering menggunakan media sosial untuk menyuarakan pandangan mereka. Misalnya, dalam kasus tertentu seperti isu kebangsaan atau keagamaan, retorika politik digunakan secara intensif untuk memperkuat posisi tertentu, terkadang dengan kata-kata yang tajam atau provokatif.

Ketiga, Penyampaian Kebijakan Publik dan Gaya Komunikasi Pemerintah. Pemerintah Indonesia menggunakan retorika politik dalam menyampaikan kebijakan publik.

Gaya komunikasi yang dipilih oleh pemerintah dalam memberikan penjelasan atau mempertahankan kebijakan tertentu dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons suatu keputusan.

Misalnya, penjelasan pemerintah mengenai kebijakan ekonomi atau kebijakan kesehatan publik di tengah pandemi dapat menggunakan retorika yang menekankan manfaat dan kebutuhan mendesaknya untuk mendapatkan dukungan publik.

Melalui contoh-contoh tersebut, terlihat bagaimana retorika politik digunakan dalam berbagai konteks di Indonesia untuk

dan tindakan masyarakat terhadap isu-isu politik, membentuk arah kebijakan, dan bahkan memengaruhi dinamika politik suatu negara.

Pembentukan Kedua

Apa peran utama media massa dalam mempengaruhi dan membentuk wacana publik melalui penggunaan bahasa politik dalam pelaporan dan narasi politik?

Peran media massa sangat signifikan dalam membentuk wacana publik melalui penggunaan bahasa politik. Media massa, baik cetak maupun elektronik, memiliki kekuatan besar dalam menyampaikan informasi dan mempengaruhi opini publik. Penggunaan bahasa politik dalam berita, editorial, atau liputan politik secara langsung memengaruhi cara masyarakat memahami isu-isu politik tertentu.

Dalam konteks Indonesia, media massa sering menjadi sarana utama bagi publik untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan politik dan kebijakan pemerintah. Namun, penggunaan bahasa politik dalam media seringkali terkait dengan kepentingan politik dari pemilik media atau kebijakan redaksi tertentu. Isu-isu politik dapat disajikan dengan framing atau penekanan yang berbeda, sesuai dengan sudut pandang atau kepentingan media tersebut.

Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan ruang baru bagi penggunaan bahasa politik. Media sosial menjadi platform yang kuat untuk menyebarkan narasi politik. Politisi, partai politik, atau pihak-pihak yang berkepentingan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan politik dengan berbagai gaya komunikasi, termasuk retorika politik yang dapat langsung memengaruhi opini dan sikap masyarakat.

Lebih lanjut, peran media massa sangat menonjol dalam membentuk dan memengaruhi wacana publik melalui penggunaan bahasa politik yang dipilih dalam berbagai konteks pemberitaan. Media massa menjadi jendela utama bagi masyarakat untuk memahami dan menafsirkan dunia politik, dan bagaimana isu-isu tersebut relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia, media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan portal berita online memainkan peran vital dalam memberikan informasi seputar kehidupan politik. Namun, peran mereka tak hanya sebatas penyedia informasi; media massa juga berperan dalam menyajikan sudut pandang tertentu yang dapat



Media sosial memberikan panggung baru bagi penggunaan bahasa politik. Politisi dan aktor politik memanfaatkannya untuk menyebarkan pesan-pesan politik, terkadang dengan memilih retorika yang berbeda-beda, tergantung pada audiens dan tujuan pesan yang ingin disampaikan.

Namun, tidak selalu terjadi penyebaran informasi yang seimbang di media massa. Konten yang dibagi di media sosial sering kali bersifat selektif dan dapat menciptakan kandang echo (pengguna yang hanya terpapar pada opini yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri), yang pada gilirannya memperkuat polarisasi opini.

Peran media massa dalam membentuk wacana publik melalui bahasa politik juga terkait dengan kontrol informasi dan kepentingan ekonomi. Properti media tertentu mungkin memiliki afiliasi dengan partai politik atau kepentingan bisnis tertentu, yang dapat memengaruhi cakupan berita dan penyampaian pesan politik.

Menyitir pola-pola empiris yang terjadi, berikut adalah tiga contoh spesifik yang mendukung peran media massa dalam membentuk wacana publik melalui penggunaan bahasa politik di Indonesia.

Pertama, Pemberitaan Kontroversial dalam Media Cetak dan Elektronik. Saat terjadi peristiwa politik signifikan, seperti pemilihan umum atau kasus-kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh penting, media massa seringkali memberitakan berita tersebut dengan framing yang berbeda.

Contohnya, dalam pemberitaan tentang kontroversi politik, terkadang media massa cenderung memberikan sudut pandang yang menguntungkan bagi kelompok atau figur tertentu, dengan penggunaan bahasa yang mendukung narasi tersebut.

Kedua, Penggunaan Media Sosial oleh Politisi dan Partai Politik. Politisi dan partai politik di Indonesia aktif menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan pesan politik mereka. Mereka menggunakan berbagai gaya komunikasi dan retorika politik untuk memperkuat dukungan dan memengaruhi opini publik. Misalnya, pemilihan kata-kata yang emosional atau narasi yang kuat digunakan untuk mendukung agenda politik tertentu.

Ketiga, Pengaruh Ekonomi dalam Pemberitaan Media. Beberapa media massa di Indonesia memiliki keterkaitan dengan kepentingan bisnis atau politik tertentu. Hal ini dapat memengaruhi cakupan berita dan penggunaan bahasa politik dalam penyajian informasi.



Dengan contoh-contoh ini, terlihat bagaimana media massa di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk wacana publik melalui penggunaan bahasa politik dalam pemberitaan, baik dalam media cetak maupun media elektronik, serta melalui media sosial.

Jadi, peran media massa dalam membentuk wacana publik melalui penggunaan bahasa politik tidak hanya memperluas akses informasi tetapi juga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pola pikir dan sikap politik masyarakat.

Dengan demikian, dalam konteks Indonesia dan global, media massa dan media sosial memiliki peran sentral dalam membentuk opini dan wacana publik melalui bahasa politik yang digunakan, sementara juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan informasi, kebebasan pers, dan keberagaman pendapat.

Pembentukan Ketiga

Bagaimana penggunaan kata-kata atau bahasa politik dapat membentuk kebijakan publik dan bagaimana hal tersebut memengaruhi dinamika kekuasaan dalam suatu masyarakat atau negara?

Penggunaan kata-kata atau bahasa politik memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia. Ketika para pemimpin atau pengambil keputusan menggunakan retorika politik yang kuat, mereka dapat memengaruhi opini publik serta memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil.

Contohnya, dalam menjelaskan kebijakan ekonomi, penggunaan bahasa yang meyakinkan atau narasi yang positif seringkali digunakan untuk memberikan gambaran yang menguntungkan tentang kebijakan tertentu kepada masyarakat. Selain itu, retorika politik juga sering menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan, baik dalam mempertahankan posisi politik maupun menggerakkan masyarakat untuk mendukung keputusan atau agenda tertentu.

Dalam konteks kekuasaan politik di Indonesia, penggunaan bahasa politik tidak hanya mempengaruhi opini publik, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan politik. Para pemimpin politik sering menggunakan bahasa yang memperkuat otoritas mereka, baik untuk meyakinkan masyarakat



Penggunaan bahasa politik yang tajam atau provokatif bisa memicu konflik politik, memperkuat polarisasi, atau justru membuka ruang untuk dialog politik yang lebih terbuka.

Lebih lanjut, penggunaan kata-kata atau bahasa politik memiliki dampak yang sangat besar dalam proses pembentukan kebijakan publik di Indonesia. Retorika politik yang digunakan oleh para pemimpin atau pengambil keputusan dapat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi bagaimana kebijakan publik dipahami, diterima, dan direspons oleh masyarakat.

Sebagai contoh konkret lanjutan, dalam penyusunan kebijakan lingkungan atau kebijakan ekonomi, pemilihan kata-kata yang meyakinkan atau narasi yang membangun optimisme seringkali digunakan untuk membujuk masyarakat tentang urgensi dan manfaatnya. Bahasa politik juga dapat menjadi alat untuk membentuk persepsi positif terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Penggunaan retorika politik juga tidak jarang digunakan untuk mengukuhkan kekuasaan politik. Para pemimpin sering menggunakan bahasa yang memperkuat otoritas mereka, baik untuk meyakinkan masyarakat tentang kebijakan yang diambil atau untuk menegaskan legitimasi dalam posisi politik mereka. Di sisi lain, oposisi politik juga menggunakan retorika politik untuk mengkritik kebijakan yang ada, memperoleh dukungan publik, dan mempengaruhi agenda politik.

Namun, penggunaan kata-kata dalam retorika politik juga dapat menyebabkan polarisasi dan konflik politik. Ketika bahasa politik yang tajam digunakan, terutama di ruang publik atau dalam debat politik, hal ini dapat memperkeruh suasana politik dan memperdalam kesenjangan antarberbagai kelompok masyarakat.

Pentingnya bahasa politik dalam konteks kebijakan publik juga terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Ketika retorika politik digunakan untuk menyampaikan informasi yang tidak akurat atau manipulatif, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan proses politik.

Sampai di sini, nampaknya perlu disajikan kembali beberapa potret empiris berkaitan dengan penggunaan kata-kata atau bahasa politik dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia.

Pertama, Kontroversi Kebijakan Pertanian dan Penggunaan Bahasa



menggambarkan kebijakan ini sebagai langkah untuk mendukung petani lokal dan kemandirian pangan.

Penggunaan kata-kata seperti "melindungi petani lokal" atau "mendukung kedaulatan pangan" digunakan untuk meyakinkan masyarakat tentang urgensi dan manfaatnya, sementara oposisi atau kelompok yang terpengaruh berpendapat bahwa kebijakan tersebut akan mengganggu pasokan dan ketersediaan barang.

Kedua, Pembentukan Kebijakan Kesehatan dan Komunikasi Pemerintah. Saat pandemi COVID-19 melanda, pemerintah Indonesia menggunakan bahasa politik yang membangun optimisme dan kepercayaan dalam menyampaikan kebijakan kesehatan kepada masyarakat.

Mereka menggunakan kata-kata yang membangkitkan semangat solidaritas, seperti "bersama-sama kita lawan pandemi," atau "dukung upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat." Retorika ini digunakan untuk memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah dalam menanggapi krisis kesehatan yang sedang berlangsung.

Ketiga, Debat Publik tentang Kebijakan Lingkungan dan Bahasa Politik. Saat pemerintah mengusulkan kebijakan lingkungan yang melibatkan pembangunan infrastruktur besar, terjadi debat publik yang melibatkan penggunaan bahasa politik yang berbeda.

Pemerintah cenderung menggunakan bahasa yang menekankan manfaat ekonomi dan pertumbuhan untuk membangun dukungan publik, sementara kelompok aktivis lingkungan menggunakan retorika yang menekankan risiko lingkungan dan keberlanjutan. Kedua belah pihak menggunakan kata-kata yang kuat untuk membentuk pandangan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Melalui contoh-contoh ini, terlihat bagaimana penggunaan bahasa politik secara spesifik dalam konteks kebijakan publik di Indonesia dapat memengaruhi persepsi dan respons masyarakat terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Jadi, kesimpulannya, penggunaan kata-kata atau bahasa politik bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi instrumen kekuasaan yang kuat dalam membentuk opini publik, melegitimasi kebijakan, mempengaruhi dinamika kekuasaan, serta menentukan arah politik dan respons masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.



Penutup

Dalam penutup, dapat dinyatakan bahwa pemahaman mendalam mengenai peran bahasa politik dalam membentuk wacana publik memiliki implikasi yang luas dalam dinamika politik dan komunikasi sosial. Bahasa politik bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan instrumen kekuasaan yang dapat membentuk pandangan, sikap, dan tindakan masyarakat terhadap isu-isu politik.

Penggunaan kata-kata, narasi, dan retorika politik memainkan peran sentral dalam membentuk opini publik. Strategi komunikasi politik yang efektif dapat mengubah persepsi dan mendapatkan dukungan yang lebih luas, sementara penggunaan yang tidak etis atau manipulatif dapat merusak kepercayaan publik dan meningkatkan polarisasi.

Dalam era informasi yang semakin terbuka dan cepat, media massa, termasuk media sosial, memiliki peran besar dalam membentuk wacana publik melalui penggunaan bahasa politik. Namun, dengan kekuatan ini juga datang tanggung jawab yang besar untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.

Pemahaman akan bahasa politik juga menggarisbawahi pentingnya etika dalam komunikasi politik, perlunya pendidikan politik yang memperkuat literasi informasi, serta tanggung jawab dari pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak dari bahasa yang mereka gunakan dalam proses pembuatan kebijakan.

Dengan memahami implikasi praktis dan konsep-konsep kunci terkait bahasa politik, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih cermat dalam menafsirkan pesan politik, lebih kritis dalam menganalisis informasi yang mereka terima, serta lebih mampu berpartisipasi dalam proses politik secara bijak dan beretika. Dengan demikian, pengetahuan tentang bahasa politik menjadi kunci dalam membangun wacana publik yang sehat dan dinamis dalam masyarakat.

HALAMAN: 1 2 3 4 5 6 7

LIHAT SEMUA



Lihat Politik Selengkapnya

BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

AKTUAL BERMANFAAT INSPIRATIF MENARIK MENGHIBUR

UNIK

**Belum ada penilaian.
Jadilah yang pertama untuk
memberikan penilaian!**

BERI KOMENTAR

Tulis Tangapan Anda...

Berkomentirlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

KIRIM



X CLOSE

Advertisement



[FULL] KPK Tetapkan Eks Mentan SYL Tersangka, Beber Peran...
2 bulan yang lalu

TAG

RESPONS : 0

KONTEN SPONSOR



0 0 X CLOSE

Advertisement



80 kg felett vagy? El fogod érni az 56 kg-ot! Recept



1 csésze lefekvés előtt segít akár 20 kg leadni egy hónap alatt!



Egy kígyóval aludt és amit reggel látott lesokkolta

Artikel Terkait

Recommended by

Sesulit Apa Pelatihan Mandiri Melalui Platform...

Makna dari Lirik Lagu Wide Awake - Katy Perry...

Mengubah Miskonsepsi Peran Wali Kelas

Masa Depan Bundo Kanduang Lewat Dhifla...

Hati-Hati terhadap Penipuan Tawaran Kerja...

Mengapa Materi Esai Begitu Menakutkan dala...

TENTANG KOMPASIANA

PROFIL

PERFORMA & STATISTIK

TIM

JARINGAN

KG MEDIA.ID

SYARAT DAN KETENTUAN

DEFINISI

KETENTUAN LAYANAN

KETENTUAN KONTEN



Advertisement



FAQ KOMPASIANA

KONTEN

TEKNIS DAN GANGGUAN

TIPS DAN TUTORIAL

BISNIS DAN KERJA SAMA

BANTUAN

KONTAK KAMI

Gedung Kompas Gramedia Palmerah Barat Unit II Lantai 6, Jl. Palmerah Barat No. 29-37, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

☎ 6221 536 99 200

☎ 6221 5360678

✉ kompasiana@kompasiana.com

Untuk Pengajuan Iklan Dan Kerja Sama Bisa Menghubungi:

kerjasama@kompasiana.com

© 2018 KOMPASIANA.COM. A SUBSIDIARY OF KG MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED



Advertisement